



Dugaan Pungli Objek Wisata

BPKP Investigasi ke Karangasem

Amlapura (Bali Post) -

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali turun ke Karangasem. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti permintaan Kejari Amlapura. Dari hasil investigasi BPKP, baru kemudian disimpulkan apakah ada indikasi kerugian negara atau tidak pada kasus dugaan pungutan liar di beberapa objek wisata.

Kepala Kejari Amlapura I Nyoman Sucitrawan menyampaikan, BPKP sejauh ini masih melakukan investigasi selama sebulan untuk menjawab *progress* penanganan kasus, saat ditemui di kantornya, belum lama ini. Agar datanya lebih komprehensif dapat diperoleh, Kejaksaan menugaskan Tim BPKP melakukan investigasi. Karena itu, pihak BPKP sudah mendatangi sejumlah objek wisata termasuk induk institusinya, Dinas Pariwisata.

"Pada kasus dugaan pungli di objek wisata itu ada indikasi kerugian negara. Tetapi masih belum diketahui karena masih menunggu hasil investigasi BPKP," kata Sucitrawan.

Dari sepuluh objek wisata yang dicurigai ada praktik praktik pungli, Sucitrawan menegaskan, BPKP yang

akan memberikan penilaian, objek mana yang menimbulkan dampak kerugian negara paling besar.

Setelah hasil audit BPKP keluar, baru kasusnya akan difokuskan ke dua atau tiga objek wisata dari sepuluh objek wisata yang dicurigai ada praktek pungli. "Kapan hasil auditnya keluar, kami tak bisa pastikan. Itu merupakan kewenangan sepenuhnya dari BPKP. Tetapi, apapun yang dibutuhkan dalam proses investigasi, sudah kami penuhi," tegasnya.

Sucitrawan menyampaikan, penanganan dugaan pungli 10 objek wisata ini, belajar dari kasus pungli di Tulamben. Sebab, dicurigai ada 10 objek wisata lainnya yang melakukan praktik serupa. Berawal dari kasus ini, malah Kejari Amlapura sudah melakukan penelid-

kan lanjutan terhadap objek wisata lainnya. Pihaknya sudah merampungkan proses penyelidikan. Sehingga saat ini tinggal menunggu hasil audit BPKP terhadap dugaan kerugian negara akibat praktek korupsi. Sudah dari tahun 2011 sampai 2017 kasus dugaan korupsi itu terjadi. "Hasil pemeriksaan ini, ada yang tidak *balance* antara tiket dan pemasukan," katanya.

Ada Tak Beres

Kejari Amlapura mencium ada yang tidak beres, setelah melakukan pengembangan terhadap kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) pelaku

pungli di Objek Wisata Tulamben, Kecamatan Kubu. Selama kurun waktu 2011-2017, diduga terjadi tindak pidana korupsi. Ini menjadi salah satu bentuk penyebab kebocoran pendapatan di sektor pariwisata. Upaya pengembangan penanganan kasus setelah dalam persidangan, terungkap kasus OTT di Tulamben terjadi karena minimnya pengawasan OPD terkait.

Pelakunya adalah I Nengah Subrata alias Panyong (40) divonis satu tahun dua bulan, tetapi dia masih bisa leluasa "bermain" dalam tiket. Hal itu bisa dilakukan karena tidak ada kontrol.

"Kalau tidak ada kontrol, jadinya petugas pungutnya mau ambil tiket berapa pun tidak jadi masalah. Kami melihat justru disitu masalahnya," kata Sucitrawan. (kmb31)

"Pada kasus dugaan pungli di objek wisata ada indikasi kerugian negara. Tetapi masih belum diketahui karena masih menunggu hasil investigasi BPKP."

Kepala Kejari Amlapura I Nyoman Sucitrawan

Edisi : Coron , 2 sept 2018

Hal : 12